

**MEMBENTUK KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB WARGA
NEGARA MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
(Studi Kasus pada Partai Politik PDI Perjuangan Di Kabupaten Sintang)**

Oleh

Juri

Dosen STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Kalimantan Barat

E-mail: jurisaputra@yahoo.com

**Abstrak: Membentuk Karakter Bertanggung Jawab Warga Negara Melalui
Pendidikan Politik (Studi Kasus pada Partai Politik PDI
Perjuangan di Kabupaten Sintang)**

Penelitian ini bertolak dari keprihatinan mengenai suhu politik yang ada di Kabupaten Sintang belakangan ini, berkaitan dengan aktivitas politik para politisi partai yang cenderung jauh dari nilai-nilai moral serta tanggung jawab terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kesadaran politik, dibutuhkan pendidikan politik secara formal maupun non formal. Bentuk pendidikan politik PDI Perjuangan berupa seminar, pelatihan, diklat, dan rapat partai. PDI Perjuangan dapat berperan layaknya Pendidikan Kewarganegaraan misalnya sebagai sumber inspirasi akademik, dan sarana perubahan perilaku untuk membangun partisipasi politik warga negara yang bertanggung jawab. Dengan adanya muatan tersebut, diharapkan PDI Perjuangan dapat berjalan beriringan dengan Pendidikan Kewarganegaraan guna mencapai kehidupan yang lebih baik. PDI Perjuangan belum bisa melaksanakan pendidikan politik secara maksimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Karakter Bertanggung Jawab, Pendidikan Politik, Partai Politik, dan PKn.

**Abstract: Shaping Character Responsible Citizen Through Political
Education (Case Study at Political Parties PDI Perjuangan in Sintang
District)**

This study is based on the concern about the political climate in recent Sintang District, related to the political activities of the politicians who tend to be away from moral values and responsibility towards society. This study used a qualitative approach. These results indicate that in order to achieve political consciousness, it takes political education both formal and informal. PDI Perjuangan form of political education in the form of seminars, training, training, and party meeting. PDI Perjuangan can act like Civics for example as a source of inspiration academic, behavioral changes and means to build political participation of citizens in charge. With the charge is expected PDI Perjuangan can go hand in hand with civics to achieve a better life. PDI Perjuangan has not been able to carry out political education to the maximum due to various

Keywords: Character Responsible, Political Education, Political Parties, and Civics.

Pendidikan politik seharusnya memberikan pencerahan kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas supaya setiap warga negara dapat berpartisipasi dengan suka rela dan penuh tanggung jawab pada bidang politik dan pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan sejahtera dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut Hermawan (2007, hlm.26) pendidikan politik merupakan usaha untuk memasyarakatkan politik dalam arti untuk mencerdaskan kehidupan politik rakyat dan meningkatkan kesadaran warga negara dalam kehidupan berpolitik. Oleh karenanya pendidikan politik harus dilaksanakan secara berkesinambungan menuju warga negara yang melek politik.

Disisi lain perilaku politik para politikus masih jauh dari nilai moral serta keberpihakkannya pada masyarakat selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis. Sampai saat ini arus informasi yang ada selalu mengalir lebih deras dari atas. Sementara arus yang memancar dari bawah hanya terlihat sayup-sayup dan jarang sampai pada tingkat atas. Hal tersebut, menurut Kushandjani (1992, hlm.186) disebabkan karena:

1. Sikap daripada birokrat yang sering menganggap dirinya paling benar dan paling tahu tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Karena adanya kepentingan politis dan ekonomi tertentu, maka sering terjadi arus informasi yang datang dari bawah sudah terpotong di tengah jalan.

3. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang relatif masih rendah yang mengakibatkan mereka tidak bisa memformulasikan tuntutan dan dukungan mereka menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pihak lain.

Partai politik semestinya mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas supaya seluruh warga negara dapat melek politik dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dan dalam hal seperti ini mestinya pendidikan politik memberikan pencerahan kepada seluruh kader, dan pengurus partai supaya kedepan segala perilaku politik wakil rakyat bisa memihak seluruh kepentingan publik. Alfian (1986, hlm.235), mengatakan bahwa pendidikan politik adalah usaha yang sadar untuk mengubah sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang hendak di bangun.

Perekrutan kader partai harus selektif sehingga pelaksanaan sistem politik bisa dijalankan secara profesional dan pimpinan partai sebagai pemegang legitimasi tertinggi kebijakan harus membuat berbagai keputusan serta peraturan yang membuka ruang selebar-lebarnya kepada seluruh warga negara untuk menjadi kader partai dengan seleksi yang ketat, murni dan konsekuen.

Pendidikan politik dapat diajarkan secara formal dan nonformal terutama melalui mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah, pendidikan politik bisa diberikan lewat diskusi tentang tata pemerintahan, mempelajari rambu-rambu lalu lintas, pemilihan ketua OSIS serta pemilihan organisasi lainnya dalam lingkup sekolah, dimana dalam kegiatan tersebut siswa harus dididik untuk mengedepankan musyawarah mufakat. Sementara itu di perguruan tinggi, pendidikan politik bisa diberikan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yakni lewat diskusi tentang berbagai kebijakan pemerintah, pemilihan rektor, pemilihan senat, pemilihan ketua BEM, serta organisasi lainnya dalam lingkup kampus.

Sejalan dengan ungkapan di atas, Kantaprawira (1999) dalam Hermawan (2007, hlm.28) mengatakan bahwa sarana pendidikan politik dapat berupa:

1. Bahan yang dapat dibaca (*readable, legible*) seperti surat kabar, majalah dan lain-lain yang bersifat publikasi massa dan yang dapat membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio yang di dengar dan televisi serta film yang dapat di lihat dan di dengar.
3. Lembaga-lembaga, asosiasi-asosiasi, dalam masyarakat, seperti gereja, masjid yang menyampaikan kotbah serta kemungkinan juga melalui formil ataupun informil.

Perkembangan dunia saat ini telah membawa umat manusia menuju pola yang sentralistik. Arus globalisasi yang semakin canggih membuat manusia terus berubah mengikuti arus tersebut yang pada akhirnya perubahan dalam politik pun terjadi. Internet sebagai salah

satu media yang paling canggih saat ini telah menancapkan pengaruhnya yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Semua informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui media ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan politik. Dalam hal ini Prayudi (2007, hlm.142) mengatakan bahwa transformasi politik terjadi dan memiliki dampak luas ketika mendapat dukungan dari media. Sementara itu, Sasmita (2011, hlm.218), mengatakan bahwa media massa merupakan sarana paling efektif digunakan untuk menyebarkan dan menjangkau informasi politik.

Melalui media masa pemerintah dapat menyampaikan berbagai pola kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Sebaliknya, melalui media pula masyarakat sebagai pengguna dari kebijakan tersebut dapat memberikan kritikan dan saran apabila kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah tidak menyentuh sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. Untuk itu, menurut Wahyuningsih (2011, hlm.33) kebijakan demokrasi (*democratic policy*) merupakan proses kebijakan yang mengupayakan keseimbangan relasi kekuasaan dalam proses kebijakan, dan berupaya menghasilkan keuntungan secara lebih luas bagi semua kelompok warga negara. Dengan demikian pembuatan kebijakan hendaknya harus melalui kajian dari bawah sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Pelaksanaan pendidikan politik melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah maupun di perguruan tinggi diharapkan dapat membentuk karakter bertanggung

jawab warga negara. Namun, pendidikan karakter harus diberikan mulai dari lingkungan keluarga terutama oleh orang tua. Sedangkan di sekolah maupun di perguruan tinggi hanya sebagai pendukung serta kelanjutan dari pendidikan karakter dalam keluarga. Oleh karenanya, menurut Kardiman (2009) pendidikan karakter merupakan pendidikan yang mesti terencana, terarah, dan berkesinambungan dari sejak dini oleh berbagai pihak, baik sekolah, masyarakat maupun keluarga dan diantara ketiga elemen tersebut harus saling mendukung serta saling melengkapi supaya dapat berjalan beriringan. Untuk itu, menurut Elfindri (2012) dalam Malinda (2013, hlm.11) pada setiap individu tidak hanya terdapat *hard skill* semata, melainkan ada juga *soft skill* yang merupakan keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk diri sendiri, kelompok dan masyarakat.

Pendidikan karakter bersifat urgen bagi bangsa Indonesia saat ini untuk mempersiapkan generasi mendatang yang diharapkan tidak hanya cerdas secara kognitif melainkan cerdas secara psikomotorik. Hal tersebut penting untuk dilakukan supaya karakter generasi penerus bangsa ini dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga berbagai ancaman disintegrasi bangsa dapat ditekan. Sebab, menurut Sukadi (2011, hlm.81) sebagaimana yang dikutip Sukmayadi (2013, hlm.51) ada beberapa permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dalam pembangunan karakter bangsa, diantaranya: (1) Disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa. (2) Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-

nilai esensi Pancasila. (3) Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (4) Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. (5) Ancaman disintegrasi bangsa. (6) Melemahnya kemandirian bangsa.

Karakter yang baik dan bertanggung jawab hanya dapat terbentuk melalui proses pendidikan sepanjang hayat (*long life education*). Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghindari reduksionis, linier dan berbau positivisme. Budimansyah (2012, hlm.iii-iv) dalam Wardaya dan Suryadi (2013, hlm.66) mengatakan bahwa, *Pertama*, reduksionisme dalam pendidikan saat ini telah merusak makna pendidikan sehingga berdampak pada sulitnya peserta didik untuk menemukan relevansi makna dan nilai antara sekolah dan dalam kehidupan nyata. *Kedua*, orientasi pendidikan nasional saat ini cenderung menyiapkan anak untuk cerdas secara akademik, dan mengabaikan aspek kecerdasan emosional dan spiritual. Namun disisi lain menurut Arifin dan Suherman (2013, hlm.85) pendidikan juga menentukan mutu sumber daya manusia yang menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Oleh karena, menurut Hakam dalam Yusuf dan Syihabuddin (2013, hlm.96), seseorang yang utuh harus terampil dalam berbicara, menggunakan simbol-simbol, isyarat, terinformasi secara faktual, cakap dalam mengkreasi dan mengapresiasi obyek estetika, memiliki kedisiplinan hidup dalam hubungannya dengan diri sendiri dan orang lain, mampu membuat keputusan yang bijak dan mempertimbangkan antara benar dan

salah, dan menguasai pandangan integral.

Untuk itu, setiap warga negara diharapkan dapat mempunyai konsep diri yang baik dan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta budaya bangsa dalam kehidupan sehari-sehari guna membentuk karakter bertanggung jawab warga negara dalam lingkup keluarga, masyarakat, pendidikan, bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut Suratmi, dkk (2013, hlm.34) mengatakan bahwa konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan terbentuknya sikap yang baik. Dikatakan lebih lanjut bahwa upaya pengembangan konsep diri dapat dilakukan melalui: (1) Lingkungan keluarga dengan situasi sosial-emosional yang baik. (2) Lingkungan sekolah, yakni dengan menciptakan sosio-emosional yang menyenangkan, nyaman dan menggairahkan. Dengan demikian apabila hal ini diterapkan dalam bidang politik, maka secara teoritis diharapkan seluruh warga negara dapat mempunyai konsep diri terhadap tanggung jawab untuk terlibat dalam setiap proses politik guna mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Warga negara adalah seluruh penduduk yang berada dalam suatu wilayah sebuah negara yang mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Wuryan dan Saifullah (2013, hlm.110-111), ada beberapa teori yang berkaitan dengan kewarganegaraan, yakni; (1) Teori Kewarganegaraan Liberal-individualistik. Menurut teori ini warga negara adalah pemegang otoritas untuk menentukan berbagai pilihan dan hak-haknya. Warga negara sebagai individu, menentukan pilihannya sendiri dengan pertimbangan yang menghargai hak

orang lain, (2) Teori Kewarganegaraan Komunitarian. Menurut teori ini, warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang dalam menentukan dan melaksanakan tindakannya senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan masyarakat. Masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi adanya kewarganegaraan, oleh karenanya, tiada kewarganegaraan tanpa masyarakat, sebaliknya adanya masyarakat maka berarti ada kewarganegaraan, (3) Teori Kewarganegaraan Neorepublikan. Menurut teori ini, kewarganegaraan adalah sebagai suatu jabatan lembaga dalam publik, yang berhak dimiliki oleh setiap warga negara, keharusan adanya kesamaan dalam bidang politik, dalam arti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam konteks kehidupan politik.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang selalu siap sedia melaksanakan segala kewajiban baru kemudian menuntut haknya. Dalam hal ini Sapriya, dkk (2013, hlm.2) mengatakan bahwa warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Maksudnya adalah bahwa setiap warga negara yang baik itu tentunya tidak hanya tahu dan menuntut haknya semata, melainkan harus terus menunaikan kewajibannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan Hermawan, (2007, hlm 30) mengatakan bahwa warga negara dipandang baik apabila mereka memiliki sikap disiplin dalam agama. Sebutan yang tepat adalah mereka yang dipandang taat, patuh dalam menjalankan kewajiban serta menjahui perbuatan yang dilarang. Warga negara yang baik berarti mereka taat menjalankan perintah

agama dan patuh pada hukum negara, hidup rukun dan menjalin hubungan harmonis terhadap sesama manusia serta mereka hidup berkeadilan.

Warga negara yang baik paling tidak dapat dibentuk melalui pendidikan politik dan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan masyarakat secara formal dan nonformal. Partai politik terutama PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dapat menerapkan pendidikan politik secara nonformal yakni melalui seminar, diklat, diskusi politik dan pelatihan kepemimpinan. Sementara itu, dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan dapat diterapkan melalui materi tentang sistem pemerintahan dan badan kelengkapan negara. Di masyarakat, pendidikan politik dapat juga diterapkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan yakni melalui perilaku sehari-hari terutama yang berkaitan dengan diskusi politik. Dengan demikian menurut Tansil (2013, hlm.38), Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya menjadi mata pelajaran di persekolahan, tetapi dapat menjadi Pendidikan Kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (*Community civic education*).

Dengan demikian warga negara yang baik dan bertanggung jawab adalah warga negara yang selalu siap sedia melaksanakan hak dan kewajibannya secara sukarela, dan penuh kesadaran dalam rangka menunjang pembangunan berkelanjutan, baik dalam lingkup lokal maupun nasional. Warga negara yang demikian seyogyanya dapat terbentuk melalui pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terutama PDI Perjuangan di

Kabupaten Sintang. PDI Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada seluruh kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas guna membentuk warga negara yang melek politik dan bertanggung jawab terutama dalam bidang politik.

Adapun tujuan umum PDI Perjuangan yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal enam ayat satu: "Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur". Tujuan khusus dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal tujuh ayat satu "Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat". Kemudian selanjutnya fungsi dari partai ini sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar pada pasal delapan ayat satu "Sebagai sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa". Kemudian pada ayat dua dikatakan "Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara:". Merujuk pada Anggaran Dasar tersebut, jelas bahwa PDI Perjuangan mempunyai dasar yuridis untuk melaksanakan pendidikan politik kepada kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas supaya dapat melek politik.

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative approach*). Adapun alasan penggunaan pendekatan kualitatif karena penulis hanya menggambarkan atau mendeskripsikan keberadaan PDI Perjuangan di masyarakat, bentuk pendidikan politik, proses pendidikan

politik, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan politik, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut serta hasil dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang guna membentuk karakter bertanggung jawab warga negara tanpa melakukan perhitungan secara kuantitatif atau tanpa menggunakan angka secara statistik.

Sugiyono, (2010, hlm.15) mengatakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (*key instrument*), pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Alwasilah (2003, hlm.26), penelitian kualitatif digunakan sebagai istilah pembungkus yang meliputi sejumlah strategi penelitian yang sama-sama memiliki sejumlah sifat tertentu, yang diambil dari serangkaian asumsi yang saling berhubungan yang bersifat khas paradigma kualitatif.

Adapun karakteristik penelitian terutama penelitian kualitatif menurut Creswell (2010, hlm.261-263), adalah: (1) lingkungan alamiah/*natural setting*, (2) peneliti sebagai instrumen kunci/*researcher as key instrument*, (3) beragam sumber data/*multiple sources of data*, (4) analisis data induktif/*inductive data analysis*, (5) makna dari para

partisipan/*participants meaning*, (6) rancangan yang berkembang/*emergent design*, (7) perspektif teoritis atau *theoretical lens*, (8) bersifat penafsiran atau *interpretative*, (9) pandangan menyeluruh atau *holistic account*. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, atau dengan kata lain tujuan penelitian kualitatif adalah rancangan penelitian yang dipilih.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bogdan & Biklen (1982: hlm.58) mengatakan: "*A case study is a detailed examination of one setting or one single subject or one single depository of document or one particular event.*" Selanjutnya, Bogdan & Biklen (1982, hlm.59) menggambarkan rancangan umum dari sebuah studi kasus itu sebagai berikut:

- (1) peneliti mencari tempat dan orang yang akan dijadikan sebagai subjek atau sumber data,
- (2) menemukan lokasi yang diinginkan untuk dikaji kemudian mencoba mempertimbangkan kelayakan tempat tersebut atau sumber data untuk mencapai tujuannya,
- (3) mencari kunci-kunci tentang bagaimana ia dapat melangkah dan apa yang semestinya dilakukan,
- (4) memulai mengumpulkan data, mereview, dan mengeksplorasinya,
- (5) membuat keputusan tentang arah yang akan dituju dengan penelitiannya,
- (6) membuat keputusan tentang bagaimana mengatur waktu, siapa yang akan diinterviewe dan apa

yang akan digali secara mendalam, (7) memodifikasi desain secara terus menerus dan memilih prosedur yang lebih sesuai dengan topik kajian, (8) membuat keputusan berkenaan dengan aspek apa di antara setting, subyek, atau sumber data yang akan dikaji, dan (9) mengembangkan fokus.

Metode studi kasus adalah proses pengumpulan data dan kegiatan penelitian yang akan mempersempit wilayah, subyek, bahan, topik, dan tema. Dari permulaan pencarian yang luas, peneliti bergerak menuju pengumpulan data dan analisis yang lebih terarah. Dalam penelitian ini kasus yang dikaji adalah bentuk, proses, karakter bertanggung jawab warga negara, kendala dan solusi serta hasil pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, studi kasus ini bersifat observasional, situasional, dan aktivitas suatu tipe studi kasus kualitatif yang oleh Bogdan & Biklen disebut *Observational Case Studies*.

Studi kasus mempunyai kelebihan dibanding studi lainnya yaitu peneliti dapat mempelajari sasaran penelitian secara lebih mendalam dan menyeluruh. Menurut Alwasilah (2015, hlm.82-83), ada sejumlah kelebihan dari studi kasus sebagai berikut:

a. Peneliti bisa berfokus pada hal-hal yang subtil (*subtle*) dan rumit dari situasi sosial yang kompleks. Peneliti bisa menjelaskan hubungan sosial antar pihak yang tidak mungkin bisa dijelaskan lewat survei. Ini disebabkan studi kasus pendekatannya holistik sedangkan survei melihat persoalan secara terisolasi.

- b. Peneliti bisa menggunakan berbagai cara (*multiple methods*) untuk mendapatkan realitas yang kompleks yang sedang diteliti.
- c. Sejalan dengan kemungkinan digunakannya berbagai cara, studi kasus memungkinkan penggunaan berbagai sumber data (*multiple source of data*) yakni yang lazim disebut *triangulation*.
- d. Studi kasus layak untuk meneliti fenomena yang diteliti terjadi secara alami dan peneliti tidak memiliki kewajiban melakukan kontrol untuk merubah keadaan. Ini berbeda dengan kajian tindakan (*action research*).
- e. Studi kasus cocok untuk penelitian skala kecil tetapi memungkinkan peneliti untuk berkonsentrasi pada satu kasus topik penelitian sehingga pemahamannya mendalam. Studi kasus cocok untuk memahami proses yang terjadi, yang akan tetap tersembunyi bila hanya dilakukan lewat survei.

Sementara itu, Daniel (2003, hlm.117, 119 & 120) mengatakan bahwa keuntungan apabila peneliti menggunakan metode studi kasus adalah, peneliti akan mendapatkan gambaran yang luas dan lengkap dari subyek yang diteliti. Dikatakan lebih lanjut bahwa, ciri-ciri dari studi kasus adalah, *Pertama*, terbatas pada populasi, tempat, dan waktu tertentu. *Kedua*, cukup mudah, kadangkala mirip survei. Disisi lain, Myers (2009) dalam Sarosa (2012, hlm.123), berpendapat bahwa keunggulan studi kasus (*case study*) adalah *face* (muka/rupa). *Face validity* adalah kemampuan *case study* yang ditulis dengan baik dan didukung bukti empiris yang kuat dan kredibel untuk dipahami oleh pembaca. Selain itu, juga memungkinkan peneliti menguji

teori ke dalam situasi nyata yang sering tidak semudah atau sesederhana asumsi teori tersebut.

Subyek penelitian yang menjadi sumber data berupa: *Pertama*, AD/ART PDI Perjuangan, rancangan program kerja, dokumen kepengurusan, dan makalah. *Kedua*, sumber responden (*human resources*), yang terdiri dari pengurus inti PDI Perjuangan Kabupaten Sintang.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beragam teknik yang disesuaikan dengan tujuan serta metode penelitian deskriptif, yakni mencakup teknik pengamatan (observasi), teknik wawancara, dan studi dokumentasi.

- a. Teknik Observasi. Penggunaan teknik observasi dalam penelitian ini adalah teknik non-partisipan yang tidak terstruktur, yaitu suatu prosedur yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati subyek penelitian dalam keadaan alamiah dimana peneliti terjun langsung ke lapangan namun tidak melibatkan diri secara langsung dengan kegiatan yang dilakukan oleh subyek penelitian.
- b. Teknik wawancara. Penggunaan wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seperti apa bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, sejauhmana prosesnya, seperti apa kendalanya serta apa hasil yang telah didapatkan. Adapun tipe wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara terstruktur dan terbuka.
- c. Dokumentasi. Studi dokumentasi dimaksudkan sebagai teknik pengumpulan

data yang dilakukan terhadap berbagai dokumen tertulis berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, surat-surat penting, serta berbagai dokumen resmi kelembagaan maupun dokumen pribadi.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa alur. Dalam hal ini Sugiyono (2012, hlm.338) mengemukakan bahwa di dalam analisis data dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.

- a. Sebelum melaksanakan reduksi data. Dalam hal ini peneliti terlebih dahulu membaca, mengaji ulang serta menelusuri seluruh jenis data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan mencakup bentuk pendidikan politik, proses pendidikan politik, karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk melalui pendidikan politik, kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut serta hasil dari pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang.
- b. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka penulis segera melakukan reduksi data, yakni melakukan pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari beberapa catatan tertulis di lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan cukup banyak, sehingga penulis perlu melakukan pencatatan lebih rinci. Kemudian, penulis mengelompokkan, dan memilih data yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

- c. Setelah melakukan pencatatan dan pemilihan terhadap data yang dikumpulkan, langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah mengkaji dalam bentuk mendeskripsikan sebagai upaya penyajian data berdasarkan pada rumusan masalah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini.
- d. Peneliti membuat kesimpulan atau verifikasi. Dalam hal ini penulis membuat kesimpulan sementara yang masih bersifat tentatif sebab dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif kesimpulan yang dibuat belum bersifat final sebelum penelitian selesai dilakukan. Oleh karenanya, dengan bertambahnya data, maka penulis kembali melakukan verifikasi, yakni dengan mempelajari data-data yang muncul kemudian untuk disesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya peneliti baru membuat kesimpulan terakhir yang bersifat tetap dan final.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil

1. Deskripsi tentang keberadaan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang

Secara umum keberadaan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dapat ditelusuri mulai dari fusi lima partai ke dalam Kelompok Nasionalis pada tahun 1970 yang kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Namun, selama masa pemerintahan Presiden Soeharto, partai ini tidak menampakkan riak yang berarti sebab setiap kali pelaksanaan pemilu selalu kalah suara dengan Golkar. Baru pada

tahun 1999 partai ini mulai muncul kepermukaan setelah lengsernya Presiden Soeharto.

Adapun yang menyebabkan PDI Perjuangan bisa terus berkembang di Kabupaten Sintang adalah partai ini berasaskan Pancasila, nasionalis, serta adanya tokoh Soekarno sebagai salah satu unsur penting bagi terbentuknya partai ini. Disamping itu juga partai ini merupakan fusi dari lima partai yakni, PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, dan Murba. Sedangkan di Kabupaten Sintang sampai saat ini mayoritas tokoh PDI Perjuangan merupakan orang-orang Dayak yang beragama Katolik maupun Protestan. Oleh karenanya, ikatan agama, suku, keluarga, serta putra daerah masih terasa sangat kental dalam masyarakat. Pengaruh lainnya adalah karena figur yang dinilai oleh masyarakat bisa menampung serta memperjuangkan kepentingan masyarakat terutama yang ada di pedalaman.

Periode 2000 sampai dengan 2015 perkembangan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dengan semakin banyaknya massa pendukung, dan setiap kali pelaksanaan pemilu partai ini juga selalu mendapatkan suara yang kuat, baik untuk tingkat eksekutif maupun legislatif. Dan bupati yang sedang menjabat sekarang periode 2010-2015 di usung oleh PDI Perjuangan. Oleh karenanya, apapun yang menjadi keberhasilan dari bupati secara tidak langsung menjadi keberhasilan PDI Perjuangan.

2. Pendidikan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang

Landasan yuridis bagi PDI Perjuangan untuk melaksanakan pendidikan politik kepada pengurus,

kader, simpatisan serta masyarakat luas tercantum dalam Anggaran Dasar pada pasal delapan ayat dua yang menyatakan bahwa fungsi partai adalah “Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara”.

Dalam Anggaran Rumah Tangga partai khususnya pasal dua ayat delapan dikatakan bahwa “Dewan Pimpinan Cabang Partai membina, melatih dan mendidik Anggota Partai di wilayahnya”. Lebih lanjut dikatakan dalam pasal 31 ayat satu yang berbunyi “Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan untuk menyiapkan kader dalam melaksanakan tugas-tugas Partai”. Sementara itu, dalam ayat dua dinyatakan “BADIKLAT Partai bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota dan kader Partai, serta membuat sistem kualifikasi kader”.

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan terutama di Kabupaten Sintang secara umum sudah berjalan, namun hal tersebut masih belum bisa terlaksana secara maksimal dikarenakan berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Salah satu bukti pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan sudah berjalan adalah bahwa pada pemilu tahun 2014 yang lalu partai ini berhasil keluar sebagai pemenang (pemilu legislatif dan eksekutif). Disisi lain ada juga masyarakat yang secara terang-terangan mengakui sebagai pengurus PDI Perjuangan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota. Hal tersebut yang disinyalir sebagai bentuk keberhasilan

pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh PDI Perjuangan selama ini.

Adapun materi yang disampaikan pada saat pelatihan, rapat, seminar, diklat, maupun diskusi politik disesuaikan dengan daerah pemilihan masing-masing. Dalam hal ini partai menyerahkan sepenuhnya kepada kader untuk kreatif melihat potensi yang ada di setiap daerah pemilihannya. Namun, walaupun demikian tidak berarti keluar dari koridor partai. Secara umum, materi yang diberikan kepada pengurus, kader, simpatisan serta masyarakat luas berupa: (1) Outbound, (2) Ideologi partai, (3) Sejarah perjuangan pergerakan Indonesia dan Perkembangan Dunia, (4) Sejarah perjuangan kepartaian di Indonesia.

3. Bentuk Program Pendidikan Politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang

Dalam melaksanakan rutinitas sehari-hari, setiap partai politik mempunyai agenda yang telah disusun bersama dimana bentuk kegiatan tersebut berasal dari hasil kesepakatan bersama. Namun, walaupun demikian dapat pula dikembangkan oleh masing-masing kader partai yang disesuaikan dengan daerah pemilihannya masing-masing. Adapun bentuk program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang menurut JE (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), diantaranya: musyawarah, rapat kerja partai, memberikan pelatihan kepada kepala sekolah SD sampai SMA dan melibatkan mahasiswa atau Perguruan Tinggi.

Menurut TM (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), bentuk pendidikan politik

yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di kabupaten Sintang, diantaranya: mengadakan pelatihan kepada pengurus, kader, simpatisan, dan masyarakat luas melalui sekolah partai, terutama yang berkaitan dengan AD/ART. Menurut AG (Bendahara PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, diantaranya: mengadakan pertemuan dengan kader partai dari tingkat kabupaten sampai desa dan memberikan pelatihan atau pengarahan kepada masyarakat berkaitan dengan visi dan misi partai. Sedangkan menurut MA (Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), bentuk pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, diantaranya: bahwa pendidikan politik secara khusus tidak ada. Hanya saja di dalam organisasi PDI Perjuangan pendidikan politiknya dilaksanakan sesuai dengan AD/ART dan program partai mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

4. Proses Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang

Berjalan atau tidaknya berbagai program yang telah diputuskan, tergantung tindakan nyata dari para pengurus dan kader partai. Namun, sebaik apapun program yang telah dibuat, tidak akan bisa memberikan hasil maksimal tanpa adanya tindakan nyata dilapangan. Tindakan tersebut tentunya meminta komitmen yang tinggi dari masing-masing kader partai. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang ketika menjelang pemilu, pada saat ulang tahun partai, dan pada saat anggota dewan reses. Namun, intinya pelaksanaan pendidikan politik tersebut disesuaikan dengan jadwal

partai dan biasanya setiap tahun pasti dilaksanakan serta yang lebih intensif menjelang pemilu.

Adapun pelaksanaan ataupun proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang menurut JE (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), ketika: pendidikan politik semakin intensif dilaksanakan menjelang pemilu setiap lima tahun sekali, pembinaan terhadap pengurus, kader serta simpatisan juga terus dilaksanakan setiap tahun serta pada saat iven-iven tertentu. TM sebagai wakil ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan disesuaikan dengan program partai maupun program kader yang berhasil duduk ataupun menang sebagai anggota dewan dari daerah pemilihannya masing-masing. Selanjutnya menurut AG (Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang) mengatakan bahwa proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, biasanya dilaksanakan setiap tahun ataupun paling tidak setahun sekali. Sedangkan MA (Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang) mengatakan bahwa proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, disesuaikan dengan program partai dan moment-moment tertentu.

5. Karakter Bertanggung Jawab yang Ingin Dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui Pendidikan Politik di Kabupaten Sintang

Pendidikan di Indonesia saat ini tidak hanya berorientasi pada hasil semata, melainkan sudah mengarah pada proses yang lebih intensif terutama yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku maupun

tutur sapa para terdidik yang pada akhirnya dapat membentuk karakter bertanggung jawab terhadap dirinya, Tuhannya, keluarganya, lingkungannya, pendidikannya, serta bangsa dan negara. Adapun karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik, menurut JE (Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), diantaranya: supaya generasi penerus bangsa ini terus berusaha untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat juga harus menyadari bahwa keutuhan negara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, apalagi kita di Sintang ini berada di perbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Jadi, jangan sampai semangat nasionalisme masyarakat luntur. Untuk itu, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan terus mengupayakan pemahaman masyarakat terhadap empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhennika Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945.

Menurut TM, (Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang) karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik, diantaranya: Ketika pelaksanaan pemilu, masyarakat harus benar-benar memilih wakilnya yang bisa dipercaya, yang tidak menghambur-hamburkan uang. Sebab, besar kemungkinan apabila anggota dewan yang menang hanya mengandalkan uang tidak akan bisa berbuat banyak terhadap pembangunan di masyarakat karena suara masyarakat sudah dibeli. Untuk itu, mulai sekarang dan secara perlahan kebiasaan masyarakat yang cenderung mengarah pada politik

uang harus di tekan sedemikian rupa supaya prinsip demokrasi di Indonesia dan di kota Sintang bisa tercapai.

AG sebagai Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang mengatakan bahwa karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, diantaranya: seluruh warga negara Indonesia harus mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kemajuan bangsa ini dan mau secara suka rela ikut serta dalam membangun bangsa, bukan malah menjadi benalu di tanah sendiri. Menurut MA (Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sintang), karakter bertanggung jawab yang ingin dibentuk oleh PDI Perjuangan melalui pendidikan politik, adalah PDI Perjuangan selalu mendidik para kader dan pengurus serta simpatisan untuk selalu mengamalkan empat pilar kebangsaan dalam berbangsa dan bernegara demi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sintang dan umumnya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Disamping itu juga supaya masyarakat dapat menyadari akan hak dan kewajibannya baik dalam bidang politik maupun dalam bidang pemerintahan.

6. Kendala yang Dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam Memberikan Pendidikan Politik di Kabupaten Sintang serta Upaya yang Dilakukan guna Mengatasi Kendala tersebut.

Dengan adanya berbagai kendala yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada pengurus, kader, simpatisan serta masyarakat luas, sehingga pelaksanaan pendidikan politik tersebut belum bisa berjalan secara maksimal sesuai

dengan harapan. Menurut JE, kendala yang dihadapi PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Sintang, diantaranya: wilayah Kabupaten Sintang yang luas, jaraknya jauh sehingga sulit di jangkau, membutuhkan biaya yang besar, arus transportasi dan informasi yang sulit terutama untuk daerah pelosok, kurangnya kerjasama diantara para pengurus, kader dan simpatisan dan budaya masyarakat Sintang yang cenderung instan dan sering mengandalkan politik uang. Sedangkan solusinya menurut JE, yakni: terus memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat kepada pemerintah daerah dan pusat terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antara kabupaten sampai ke desa supaya mobilisasi barang, jasa, dan orang menjadi lancar.

Menurut TM, kendala yang dihadapi PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik di Kabupaten Sintang, diantaranya: dana yang minim, masyarakat sulit menerima kedatangan partai politik sebab politik di masyarakat masih dianggap permainan kotor oleh para pejabat negara, apabila memberikan bantuan sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak merasa dicecoki dengan unsur politik. Sedangkan solusinya menurut TM, adalah: mengatur program yang akan diberikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak merasa diintimidasi dengan politik, melakukan pendekatan yang komprehensif kepada masyarakat dan sebaiknya pengurus maupun kader tidak hanya mengunjungi masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu, menggunakan dana ketika reses (bagi kader yang duduk sebagai

anggota dewan), sedangkan bagi pengurus dan kader yang tidak berhasil menang dalam pemilu harus menggunakan dana pribadi untuk mengunjungi masyarakat.

Menurut AG sampai saat ini belum ada kendala berarti yang dihadapi oleh PDI Perjuangan dalam memberikan pendidikan politik kepada kader, pengurus dan simpatisan serta masyarakat luas dan sampai saat ini pelaksanaan pendidikan politik berjalan secara wajar. Sedangkan menurut MA, kendala yang dihadapi PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dalam memberikan pendidikan politik, diantaranya: dana yang minim dan kendala waktu. Sedangkan solusinya menurut MA adalah memotong gaji pengurus, dan kader partai yang duduk sebagai anggota dewan, bupati dan gubernur sekitar 30%. Dana inilah yang digunakan untuk menggerakkan mesin partai. Menyisipkan kegiatan pendidikan politik pada kegiatan yang lain sehingga dalam satu agenda bisa jadi di dalamnya terdapat dua kegiatan dan untuk kegiatan tersebut dananya serta waktu bisa diminimalisir.

7. Hasil Program Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh PDI Perjuangan di kabupaten Sintang

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh setiap individu maupun organisasi pasti berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan pekerjaan tersebut. Berhasil atau tidaknya pekerjaan tersebut kembali pada individu masing-masing. Namun, ukuran keberhasilan bagi setiap orang sangat berbeda. Hal tersebut disebabkan cara pandang seseorang dalam menilai bentuk keberhasilan yang berbeda-beda.

Adapun hasil program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang menurut JE, diantaranya: pada pemilu tahun 2014 yang lalu baik dalam pemilu legeslatif maupun eksekutif, PDI Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang. Apa yang selama ini disampaikan ataupun diberikan oleh PDI Perjuangan bisa diterima oleh masyarakat luas dan kehadiran partai ini masih diakui oleh masyarakat terutama di Kabupaten Sintang. Begitu juga para caleg yang mencalonkan diri melalui partai ini dinilai oleh masyarakat mempunyai kapasitas sehingga masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya sebagai wakil yang duduk di parlemen. Menurut TM, hasil dari program pendidikan politik yang dilakukan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, diantaranya: pada pemilu tahun 2014 yang lalu PDI Perjuangan berhasil keluar sebagai pemenang. Hal tersebut membuktikan bahwa PDI Perjuangan beserta caleg yang mencalonkan dirinya masih dipercaya oleh masyarakat untuk mewakili mereka duduk sebagai seorang anggota dewan/parlemen.

Menurut AG, hasil program pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, diantaranya: menghasilkan kader-kader yang menang sebagai anggota legeslatif dan eksekutif. Sementara itu dimasyarakat, sampai saat ini mereka sudah berani secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka menjadi kader, pengurus maupun simpatisan PDI Perjuangan lengkap dengan kartu anggota. Disisi lain masyarakat sudah semakin memahami akan hak beserta kewajibannya terutama dalam bidang politik. Sedangkan menurut MA, hasil program pendidikan politik

yang dilakukan PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang, diantaranya: bahwa selama sepuluh tahun terakhir PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sebagai partai oposisi dan sebagai partai penyeimbang. Dalam rentang waktu sepuluh tahun tersebut PDI Perjuangan betul-betul menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu terutama pada tahun 2014 yang lalu. Hal tersebut terbukti dengan kemenangan yang diraih oleh PDI Perjuangan terutama pada pemilu legeslatif, yakni dengan menguasai sembilan kabupaten/kota di Kalimantan Barat, diantaranya: kota madya (Pontianak), Kubu Raya, Mempawah, Ketapang, Singkawang, Landak, Sanggau, Sekadau, dan Sintang.

PEMBAHASAN

Bentuk Program Pendidikan Politik yang Dilakukan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dan Implementasinya di Masyarakat.

Adapun bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan di Kabupaten Sintang dalam rangka membentuk karakter bertanggung jawa warga negara, diantaranya: seminar, diklat, diskusi politik, dan rapat partai. Hal tersebut bertujuan untuk membentuk karakter kader maupun pengurus supaya kedepan dapat berkontribusi terhadap pembangunan terutama di Sintang. Tujuan lainnya adalah supaya kader partai ini dapat menghindari politik uang dalam pelaksanaan pemilu. Ini dimaksudkan supaya kader partai bisa mendidik masyarakat sebagai konstituen untuk tidak mengandalkan politik uang. Kader partai harus memberikan pendidikan politik kepada seluruh masyarakat terutama di daerah pemilihannya masing-masing supaya dengan demikian demokrasi bisa berjalan sebagaimana

mestinya. Menurut Arianto (2011, 57) pemilih yang ideal harus mengetahui dampak dari satu suara yang diberikan dalam pemilu. Dan partai politik melalui kader dan pengurusnya harus menunjukkan perilaku yang terpuji (tutur sapa, tingkah laku dan perbuatan) serta mempunyai etika sebagai seorang calon pemimpin yang akan mengemban amanat rakyat. Oleh karenanya, menurut Prajarto (2011, hlm.350), saat etika politik tak lagi dijunjung tinggi, keamanan politik pun menjadi barang berharga mahal.

Pelaksanaan bentuk pendidikan politik di atas biasanya paling tidak setahun sekali. Hal tersebut bertujuan supaya masyarakat semakin mengerti dan memahami mengapa mereka harus terlibat aktif dalam setiap proses politik terutama pada tingkat lokal. Dalam hal ini, Yusuf (2011, hlm.229) mengatakan bahwa tujuan politik memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat tingkat lokal yang secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik tingkat nasional dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat sipil (*civil society*).

Pendidikan politik sangat penting dilakukan guna memberikan pemahaman kepada seluruh warga negara terkait keterlibatan mereka dalam setiap proses politik. Kurangnya pendidikan politik, bisa menjadi penyebab masyarakat tidak memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Arianto (2011, hlm.57-58) mengatakan bahwa penyebab seseorang tidak memilih (golput) dalam pemilu adalah karena faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terdiri dari teknis dan faktor pekerjaan. Faktor teknis berkaitan dengan, misalnya, ada kegiatan yang lain maupun

dalam keadaan sakit sehingga menyebabkan yang bersangkutan (pemilih) tidak bisa datang ke TPS. Sedangkan faktor pekerjaan berkaitan dengan kondisi pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan karena mereka harus tetap bekerja pada saat pemilihan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Selanjutnya faktor eksternal terdiri dari faktor administrasi, faktor sosialisasi dan faktor politik. Faktor administrasi berkaitan dengan, misalnya, tidak terdata sebagai pemilih, tidak mempunyai KTP (kartu identitas) dan tidak mendapatkan kartu pemilih. Faktor sosialisasi berkaitan dengan tata cara dalam memilih, (suara yang sah dan tidak sah), dan dalam setiap pemilu, terutama pemilu setelah reformasi selalu diikuti oleh sebagian peserta pemilu yang berbeda. Faktor politik berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap partai politik, tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia maupun tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.

Merujuk pada faktor-faktor penyebab golput dalam pemilu, maka sudah selayaknya pendidikan politik diberikan kepada seluruh warga negara melalui kader partai terutama di daerah pemilihannya masing-masing. Pengurus, dan kader partai PDI Perjuangan mestinya tidak hanya mengunjungi masyarakat menjelang pemilu, akan tetapi hal tersebut harus dilaksanakan setiap ada kesempatan. Harold R. Isaacs (1997, hlm.41) dalam Haryanto (2009, hlm.141) mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di dalam relasi kekuasaan akan membawa perubahan pada cara bagaimana kelompok memaknai dirinya dan hubungannya dengan kelompok-kelompok lainnya. Oleh sebab itu,

seyogyanya politisi partai politik terutama PDI Perjuangan diharapkan tidak hanya mewakili dari kelompok tertentu saja sesuai dengan jabatan yang diembannya, yakni “Anggota DPRD” Kabupaten Sintang, bukan “Anggota DPRD” salah satu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, Muana (salah satu responden) yang penulis wawancara ketika melaksanakan penelitian mengatakan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sintang bukan hanya sebagai anggota dewan yang memperjuangkan salah satu kepentingan etnis saja, melainkan kepentingan semua etnis harus diperjuangkan sebab penduduk Kabupaten Sintang sangat beragam/multi etnis.

Sementara itu, karakter bertanggung jawab warga negara yang diharapkan dengan adanya pendidikan politik diantaranya, bahwa setiap kader PDI Perjuangan harus mendidik masyarakat secara perlahan untuk menghindari politik uang terutama dalam pelaksanaan pemilu. Dan kader partai sendiri harus mempunyai komitmen yang tinggi supaya jangan mengiming-imingi masyarakat dengan janji-janji yang mengarah pada politik uang. Untuk itu, menurut Prasetya (2011, hlm.37-38) partai politik harus menghadirkan berbagai program dalam bentuk aksi nyata yang langsung dapat diamati dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan. Sebab partai politik merupakan tempat untuk mencetak kader yang dapat dijadikan sebagai calon pemimpin baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini senada dengan pendapat Muana (salah satu responden) yang mengatakan bahwa kader PDI Perjuangan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai anggota dewan, bupati, gubernur,

dan presiden hendaknya mampu memperjuangkan berbagai kepentingan masyarakat luas dan tidak keluar dari ideologi partai.

KESIMPULAN

Partai politik merupakan lembaga politik tempat warga negara menyalurkan berbagai aspirasi politiknya guna turut serta membangun negara menuju masyarakat yang adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang kehidupan.

Terbukanya kebebasan dalam perpolitikan membawa implikasi yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis partai politik di tanah air. Dari dua partai politik (PDI dan PPP) dan satu Golongan Karya (Golkar) pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kini, setelah masa reformasi jumlah partai politik tidak stabil.

PDI Perjuangan sebagai salah satu partai senior dalam percaturan perpolitikan di Indonesia telah banyak mengalami hambatan dan juga rintangan sesuai dengan dinamika suhu perpolitikan yang sedang bergulir. Mulai dari proses penggabungan (fusi) lima partai yakni Partai Katolik, Parkindo, PNI, Murba dan IPKI pada tahun 1970 yang disebut dengan Kelompok Nasionalis. Kemudian pada tanggal 10 Januari 1973, barulah Kelompok Nasionalis ini berubah dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan pada tahun 1999 berdasarkan hasil Munas IV di Bali berubah nama lagi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sampai sekarang.

Sebagai partai senior, PDI Perjuangan berperan penting dalam memberikan pendidikan politik terhadap, kader, pengurus, simpatisan dan masyarakat luas dalam bentuk pelatihan, seminar,

diskusi politik, rapat partai, diklat dan pelatihan kepemimpinan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perpolitikan guna memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama di Kabupaten Sintang tentang politik. Disamping itu juga pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan merupakan amanah yang implementasinya tidak bisa ditawar sebab sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 terutama pada pasal 12 huruf (e) menyatakan bahwa "Partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya".

Bagi PDI Perjuangan keharusan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 di atas telah diakomodir dalam Anggaran Dasar partai pada pasal delapan mengenai fungsi partai terutama dalam ayat satu, dua dan lima secara berturut-turut: Ayat satu "Sebagai sarana guna membentuk dan membangun karakter bangsa". Ayat dua "Mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara". Ayat lima "Melakukan komunikasi dan partisipasi politik warga negara".

Pendidikan politik yang dilaksanakan oleh PDI Perjuangan bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam bidang politik, yakni untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara suka rela dan penuh tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pengertian warga negara yang baik adalah warga negara yang siap sedia melaksanakan kewajibannya

berupa taat membayar pajak, memberikan suara ketika pelaksanaan pemilu, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap kebijakan pemerintah melalui cara-cara yang demokratis, menggunakan media cetak maupun elektronik, menggunakan baliho (spanduk), serta melakukan demonstrasi secara santun.

Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan juga bertujuan membentuk karakter bangsa Indonesia yang lebih bermartabat, santun dan bijak dimana dalam implementasinya menerapkan konsep Pendidikan Kewarganegaraan terutama konsep Pendidikan Kewarganegaraan kemasyarakatan. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya memberikan pembinaan dan pengajaran di sekolah semata, melainkan menerapkan pengajaran serta pembinaan di masyarakat supaya masyarakat Indonesia bisa menjadi manusia yang berkarakter, religius, cakap, rela berkorban, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, serta bertanggung jawab terhadap dirinya, Tuhan, keluarga, lingkungan sekitar, lingkungan pendidikan, masyarakat, bangsa maupun negara.

Adapun tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya ingin membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, saling menghargai dan menghormati dalam kemajemukan, serta membentuk watak keperibadian yang baik, yakni (a) menambah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), (b) mengembangkan

keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan (c) meningkatkan partisipasi kewarganegaraan (*civic partisipation*).

DAFTAR RUJUKAN

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan. Dokumen partai. Tidak diterbitkan.
- Alfian. (1992). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal.235.
- Arifin, S & Suherman, A. (2013). *Internalisasi Nilai Sportivitas melalui Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*. Vol.2,No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.58.
- Alwasilah, A.C. (2003). *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: PT. Kiblat Buku Utama. Hal.26
- Alwasilah, A.C. (2015). *Pokoknya Studi Kasus kualitatif*. Bandung: PT. Kiblat Buku. Hal. 82-83.
- Arianto, B. (2011). *Analisis Penyebab Masyarakat tidak Memilih dalam Pemilu*. Vol.1,No.1, 2011. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hal.57-58.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.K. (1982). *Qualitative Research for Education Introduction in Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon.Inc. Hal. 58, 59.
- Creswell, J.W. (2010). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.261-263.
- Daniel, M. (2003). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 117, 119 & 120.
- Haryanto. (2009). *Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*. Vol.13,No.2 edisi Desember 2009. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal.141.
- Hermawan, I.C. (2007). *Esensi Pendidikan Politik dan Kaitannya dengan Pembentukan Warga Negara yang Baik*. Vol.15, No.29 Tahun XV Edisi Juli-Desember 2009: Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Diponegoro. Hal.26, 28, 30.
- Kardiman, Y. (2009). *Membangun Kembali Karakter Bangsa melalui Situs-Situs Kewarganegaraan*. Vol.2, No.2, Desember 2009: Sekolah Pascasarjana UPI dan Acta Civicus.
- Kushandajani, (1992). *Komunikasi Politik Indonesia*. Nomor 70 Tahun XX 1992. Majalah Forum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Hal.186.
- Malinda, R. (2013). *Pengaruh Penerapan Pendidikan Karakter untuk Meningkatkan Soft Skill Komunikasi Mahasiswa Kebidanan*. Vol.2,No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.11.
- Prajarto, N. (2011). *Etika: Keamanan Berpolitik dan Ber-New Media*. Vol.14, No.3 Edisi Maret 2011. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal.350.
- Prasetya, I.Y. (2011). *Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik*. Vol.1,No.1 2011. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Hal.37-38.
- Prayudi, (2007). *Internet Politik: Analisis Historis Peran Teknologi Media Baru dalam Demokrasi Indonesia*. Vol. 11, No.3 Tahun 2007. Jurusan Ilmu Komunikasi

- UPN “Veteran” Yogyakarta. Hal.142.
- Sapriya, dkk. (2013). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan* (Edisi Revisi). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Hal.2.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar*. Jakarta: PT. Indek. Hal. 123.
- Sasmita, S. (2011). *Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada*. Vol.2, No.1, Edisi Januari-Juni 2011. Universitas Negeri Padang. Hal.218.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: PT. Alfabeta. Hal.15, 338.
- Sukmadinata, N.S. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal.72.
- Sukmayadi, T. (2013). *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sunda di SMA Negeri 2 Cimahi*. Vol.2, No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.51.
- Suratmi, dkk. (2013). *Hubungan Pemberian Mata Kuliah Etiket dengan Sikap mahasiswa*. Vol.2, No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.34.
- Suryabrata, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal.76.
- Tansil, S.W. (2013). *Model Pembinaan Pendidikan Karakter pada Pondok Pesantren dalam Membangun Kemandirian dan Disiplin Santri: Sebuah Kajian Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol.2, No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.38.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Hal.6.
- Wardaya, C.U & Suryadi, A. (2013). *Pendidikan Holistik Berbasis Karakter di Taman Kanak-Kanak*. Vol.2, No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.66.
- Wuryan, S & Saifullah. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (civics)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Hal.110-111.
- Wahyuningsih, R.D. (2011). *Membangun Kepercayaan Publik melalui kebijakan Sosial Inklusif*. Vol.15, No.1 Juli 2011. Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik. Hal.33.
- Yusuf, H & Syihabuddin (2013). *Pandangan Mahasiswa terhadap Perubahan Makna Semantis pada Istilah Keagamaan yang Berasal dari bahasa Arab dan Implikasinya pada pemahaman Nilai-Nilai Keagamaan*. Vol.2, No.1 Desember 2013. Jurnal Penelitian Pendidikan Karakter. Program Studi Pendidikan Umum SPs UPI & ADSPENSI. Hal.96.
- Yusuf, I.A. (2011). *Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah*. Vol.14, No.3, edisi Maret 2011. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hal.96, 229.